

DINAMIKA LSM DI INDONESIA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Oleh : Cholisin

Abstrak

Orientasi awal LSM atau NGO adalah ikut mengembangkan kesejahteraan, pembangunan dan kemudian berkembang kearah empowerment yang bersifat politis (demokrasi partisipatoris). Oleh karena itu kemudian dikenal 3 paradigma LSM yaitu konformisme, reformasi dan transformasi.

LSM yang aktivitasnya berkontribusi besar terhadap perkembangan demokrasi (LSM transformasi) jumlahnya relatif kecil. Sehingga LSM sering dikecam ikut andil dalam proses marginalisasi masyarakat.

Kontribusi LSM terhadap perkembangan demokrasi, antara lain sangat tergantung pada upaya LSM untuk melakukan konsolidasi, rekonsiliasi, kerjasama dengan kelompok-kelompok grass-root, dialog dengan pemerintah untuk melahirkan saling pengertian. Disamping itu lembaga-lembaga politik yang ada (seperti parpol, DPR) perlu ditingkatkan fungsinya agar pemberdayaan masyarakat tidak hanya akan menjadi kumpulan masyarakat yang selalu protes terhadap lembaga-lembaga politik, sementara itu lembaga-lembaga politik hanya sebagai proforma demokrasi belaka.

Pendahuluan

Keberadaan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai komuniti masyarakat sipil (civil society) tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat politik/intitusi politik (political society) yang dinilai semakin kurang berfungsi secara efektif dan karena semakin kuatnya hegemoni negara, serta proses marginalisasi sebagai salah satu dampak pembangunan.

Oleh karena itu, LSM sebagai istilah penghalus dari ornop (organisasi non pemerintah) atau NGO (non governmental organisation) dimaksudkan sebagai pengimbang dari hegemoni negara, agar masyarakat memiliki daya tawar menawar terhadap negara. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Dengan kata lain pendekatan empowerment merupakan misi utama LSM , sehingga LSM sering harus face to face dengan pemerintah. Dan sebagai hasil interaksi tersebut, disinyalir dewasa ini ada beberapa LSM yang bermasalah.

Tulisan yang singkat ini, akan mencoba memberikan gambaran sekilas tentang kiprah LSM dan sumbangannya terhadap pemberdayaan politik masyarakat (perkembangan demokrasi).

Dinamika LSM dalam Kepolitikan Negara Orde Baru

Telaah negara ORBA begitu intens. Hasil telaah itu, antara lain menyatakan bahwa negara ORBA sebagai " Bureacratic Polity", " Rent Capitalism State", "Negara Militer Rentenir", Bureaucratic Capitalist State". Ada persamaan dari berbagai predikat itu, yaitu pengakuan bahwa hegemoni negara sangat kuat.

Hegemoni negara ORBA terutama didukung kekuatan politik militer, birokrasi, tehokrasi dan konglomerasi serta budaya politik paternalistik.

Penguasa sistem politik Indonesia, masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa prioritas kebijakan pertumbuhan ekonomi yang cepat harus didukung stabilitas politik yang tinggi. Dalam kondisi kebijakan pembangunan yang demikian, memberikan peluang yang sangat besar bagi militer untuk memainkan peranan dominan dalam sistem politik, terutama sebagai penjamin stabilitas politik. Akibatnya militer lebih merupakan pendukung kedaulatan negara daripada kedaulatan rakyat. Mestinya harus lebih mengutamakan dukungan terhadap kedaulatan rakyat, sebab kedaulatan negara pada prinsipnya akan terwujud dengan baik manakala memperoleh dasar yang kuat dari kedaulatan rakyat.

Hegemoni tersebut terlihat dalam penentuan kebijakan pembangunan atau modernisasi, dimana negara sebagai faktor determinan. Rakyat sama sekali tidak berdaya, ketika berhadapan dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak-haknya yang menjadi korban pembangunan. Dalam kondisi yang demikian, maka pembangunan bagi masyarakat yang jauh dari kekuasaan (periphery) lebih merupakan proses marginalisasi baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan (pusat) lebih banyak menikmati hasil pembangunan. Pembangunan menjadi tidak merata, kesenjangan sosial, ekonomi dan politik semakin tajam.

Proses marginalisasi sebagai akibat pembangunan dapat dijelaskan lewat teori ketergantungan/dependensi. Salah satu teori ketergantungan yang cukup terkenal adalah yang dikemukakan Johan Galtung. Ahli lain yang juga mengemukakan teori dependensi yaitu: Cordosa, Andre Gunder Frank, dan Samin Amir.

Menurut Johan Galtung dalam artikelnya " Suatu Teori Struktural Tentang Imperialisme" (Amir Effendi Siregar, Ed., 1991 :131) "Teori ini bertitik tolak dari dua fakta yang paling mencolok tentang dunia ini: ketimpangan yang sangat, di dalam dan antar bangsa-bangsa dalam hampir semua segi kondisi kehidupan manusia, termasuk kekuasaan untuk menentukan kondisi-kondisi kehidupan itu; dan resistensi ketimpangan tersebut terhadap perubahan. Dunia terdiri dari negara-negara Pusat dan Pinggiran; dan tiap negara pada gilirannya, memiliki pusat dan pinggiran".

Hubungan yang terjadi di dalam suatu negara, maupun antar negara maju (pusat) dan negara dunia ketiga (pinggiran) adalah hubungan imperialisme. Ciri hubungan imperialisme (Siregar, 1991:136) yaitu: "(1) terdapat keselarasan kepentingan antara pusat dalam bangsa Pusat dan pusat dalam bangsa Pinggiran; (2) terdapat lebih banyak ketidakselarasan kepentingan di dalam bangsa Pinggiran ketimbang dalam bangsa-bangsa Pusat; (3) terdapat ketidakselarasan kepentingan antara pinggiran dalam bangsa Pusat dan pinggiran dalam negara Pinggiran".

Kepentingan yang dimaksud (Siregar, 1991:133) adalah sebagai "LC, living condition = syarat hidup..... dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti pendapatan, standar kehidupan dalam pengertian materialistis biasa - tetapi gagasan kualitas hidup kiranya pasti termasuk juga, belum lagi gagasan otonomi".

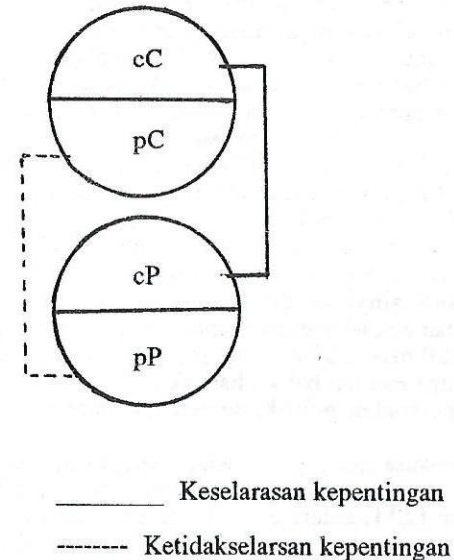
Dengan demikian, dalam hubungan imperialisme yang mendapat keuntungan dari pembangunan yang berupa LC, hanyalah pusat dalam bangsa Pusat (central dari Centrum /pusat dari negara maju) dan pusat dalam bangsa pinggiran (central dari Periphery/pusat dari negara dunia ketiga). Central dari Centrum (cC) misalnya Elite politik dan bisnis di Washington, Paris, London dan Tokyo. Sedangkan central dari Periphery (cP) misalnya, para elite politik dan bisnis di Jakarta,

Manila, Bangkok, dll, yang menjadi komprador dan bekerjasama dengan negara pusat (negara maju). Itulah kelompok-kelompok yang diuntungkan menurut teori dependensi.

Sedangkan kelompok yang selalu dirugikan dalam hubungan imperialisme tersebut adalah pinggiran dari Pusat atau periphery dari Centrum (pC) dan pinggiran dari pinggiran atau periphery dari Periphery (pP). Contoh pC: mayoritas masyarakat di negara-negara maju seperti Amerika, Perancis, Inggris dsb. Dan contoh pP: mayoritas masyarakat di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dll. Dan diantara mereka samasekali tidak saling mengenal.

Jika gambaran hubungan imperialisme dibatasi dalam lingkup bangsa/negara Indonesia, maka Jakarta dan kota sebagai cP, yang lebih diuntungkan. Sedangkan daerah dan desa sebagai pP yang selalu dirugikan.

Gambar berikut, merupakan ilustrasi struktur imperialisme menurut teori dependensi.



Gambar: Struktur Imperialisme, dimodifikasi dari Siregar. Ed., 1991. *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*. Halaman 137.

Lahir dan perkembangan LSM tidak lepas dari dampak pembangunan, terutama yang berupa semakin meningkatnya proses marginalisasi mayoritas masyarakat. Misalnya revolusi hijau dan industrialisasi perkotaan menjadi pokok bahasan kritisisme oleh kalangan aktivis LSM. Begitu pula tentang strategi pembangunan (metodologis dan teknis).

Perkembangan LSM diawali oleh Generasi I (pra-1970-an). Fokus kegiatan

generasi ini berupa kegiatan amal bagi masyarakat yang menyandang masalah - masalah sosial, semacam yatim piatu dan penderita cacat fisik dan mental. LSM generasi ini lebih membentuk dirinya sebagai yayasan keagamaan dan yayasan kemanusiaan.

Kemudian Generasi II, yaitu pada tahun 1970-an yang fokus kegiatannya pada pemecahan kemiskinan dan keterbelakangan. Dan tidak lagi bersifat primordial dan para aktivisnya merupakan bagian dari masyarakat yang beruntung mengenyam pendidikan tinggi. Dalam generasi ini LSM mengalami proses intelektualisasi.

Generasi III, tumbuh pada tahun 1980-an, kesadaran pemecahan tingkat mikro berkait erat dengan persoalan kemasyarakatan tingkat makro. Mereka memusatkan perhatian pada persoalan seputar kebijaksanaan politik pembangunan. Sehingga gerakan politik menjadi pilihan aktivitasnya, namun sifatnya masih sosio-kultural.

Generasi IV, mempertajam dengan pemberdayaan masyarakat vis a vis negara. LSM generasi empat ini dapat dibedakan dengan LSM generasi tiga setidaknya dalam tiga hal: (1) mereka benar-benar menjadikan politik sebagai wilayah bermain utama; (2) perpektif mereka dalam memandang persoalan telah semakin kritis dan struktural; dan (3) mereka menempatkan proyek minimalisasi sosok besar negara sebagai agenda utama dalam aktivitasnya. Sedangkan bentuk kegiatan LSM generasi IV misalnya dengan penyutradaraan unjuk rasa, dan advokasi.

Dengan memperhatikan perkembangan LSM di atas, maka orientasi awal LSM adalah kesejahteraan (welfare), pembangunan dan kemudian berkembang kearah empowerment yang bersifat politis (demokrasi partisipatoris).

Menurut Philip Eldridge (peneliti untuk Australia dan Asia Timur pada Institute of Southeast Asian Studies Singapura dan penulis buku Non Government Organization and Democracies Partisipation in Indonesia) jika LSM melibatkan diri pada peran seperti parpol akan terjebak pada keadaan yang membahayakan tiga peran pokoknya yaitu: *Pertama*, memperdayakan masyarakat dan membantu mereka dalam membentuk organisasinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. *Kedua*, mewujudkan nilai-nilai dan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan masyarakat. *Ketiga*, menjadi wakil masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Dan Eldridge menilai bahwa banyak LSM di Indonesia yang menaruh perhatian besar pada persoalan politik, sementara mereka mengklaim bukan organisasi politik.

Radikalisasi gerakan LSM dewasa ini, juga dihadapi dengan radikalisasi negara. Sehingga banyak LSM yang radikal terancam eksistensinya. Indikator terjadinya radikalisasi negara terhadap LSM, antara lain: (1) negara ORBA yang relatif otonom (tidak merasa perlu partisipatoris masyarakat); (2) dalam tubuh negara terjadi sentralisasi politik pada elit tertentu (satu puncak); (3) politik ORBA menempatkan ketakutan dan ketertekanan sebagai aset. Dalam kondisi kehidupan politik yang demikian, masihkah ada harapan masyarakat akan terpedayakan secara politis? Pertanyaan ini akan dicoba dijawab dalam bagian berikut ini.

LSM dan Peningkatan Kehidupan Politik yang Lebih Demokratis

Untuk menuju demokratisasi banyak jalur yang dapat ditempuh (Cholisin, 1996) misalnya lewat pertumbuhan ekonomi, pembentukan struktur sosial/borjuasi, pengembangan budaya politik demokrasi, dilakukan pemerintah otoriter sendiri, bisa dimulai dari atas dan bawah, bisa juga lewat kebangkitan civil society melalui ledakan aktivitas atau ekspresi kelompok kepentingan yang kemudian bergabung

dengan rakyat demi demokratisasi.

Sedangkan Huntington menggolongkan transisi kearah demokrasi menjadi empat corak: (1) transformasi, jika elite mengambil alih kekuasaan dan membawanya kepada demokrasi seperti yang dialami oleh Spanyol, India, Hongaria dan Brazil; (2) replacement, ketika kelompok oposisi mengambil kepemimpinan membawa negara ke arah demokrasi seperti yang terjadi di Jerman Timur, Rumania, Argentina dan Portugal; (3) transplacement, jika demokratisasi terjadi karena aksi bersama oleh pemerintah dan kelompok oposisi, misalnya di Polandia, Cekoslovakia, Bolivia dan Nikaragua; (4) intervensi, manakala lembaga demokratis dipaksakan oleh kekuatan dari luar, seperti terjadi di Jepang, Jerman Barat, Grenada, dan Panama serta Haiti.

Perubahan kearah demokrasi disamping banyak jalur yang bisa ditempuh, juga memerlukan proses konsolidasi yang bertahap. Francis Fukuyama (Cholisin, 1996: 38) menyatakan ada 4 level konsolidasi supaya demokrasi dapat terjadi, yaitu level 1: ideologi, level 2: institution, level 3: civil society, dan level 4: culture.

Untuk kawasan Asia (termasuk Indonesia tentunya) permasalahan yang dihadapi menurut Fukuyama dalam mengembangkan demokrasi adalah bagaimana melaksanakan konsolidasi budaya yang demokratis, dan mengembangkan civil society.

Dari berbagai teori tentang cara mewujudkan demokrasi maka LSM merupakan salah satu kekuatan yang dapat memberikan sumbangan bagi upaya perwujudan dan peningkatan kehidupan yang lebih demokratis. Persoalannya LSM yang mana yang dapat diharapkan untuk mengembangkan demokrasi, mengingat LSM sendiri tidak memiliki kesatuan paradigma. "Paling tidak dapat digolongkan ada 3 paradigma LSM di Indonesia, yaitu konformisme, reformasi dan transformasi" (Mansour Fakhir, 1996: 122).

Dalam paradigma konformisme, ketidak berdayaan masyarakat lebih disebabkan oleh takdir Tuhan, nasib kurang baik. Oleh karena itu perlu dibantu dengan mengurangi penderitaan mereka, misalnya dengan memberi derma dan mendoakan. Tipe LSM ini sangat percaya kepada pemerintah, sehingga sering dikenal bekerja tanpa teori.

Pada tipe reformasi, ketidak berdayaan masyarakat disebabkan lemahnya pendidikan, penduduk yang berlebihan, nilai-nilai tradisional, dan korupsi. Program yang dilakukan LSM ini misalnya pelatihan teknis dan bantuan hukum. Dalam berhadapan dengan pemerintah bersifat partisipatif. LSM tipe ini menganut ideologi modernisasi dan developmentalis.

Sedangkan dalam pandangan LSM tipe transformasi, akar masalah ketidak berdayaan masyarakat adalah adanya eksploitasi, struktur yang timpang, hegemoni kapitalis. Sehingga sasaran kegiatannya yaitu menentang eksploitasi, membangun struktur perekonomian/politik baru dan kontra diskursus. Dalam berhadapan dengan pemerintah lebih menekankan pada kritik struktural, sehingga sering dikatakan berpegang pada konsep alternatif dalam melakukan perubahan sosial.

Tampaknya LSM yang berkembang dewasa ini lebih banyak yang bertipe kompromisme dan reformasi dan sedikit yang bertipe transformasi. Ini berarti sebagian besar LSM kurang kritis dan otonom dan kurang memiliki konsep alternatif dalam memecahkan masalah dampak pembangunan khususnya masalah marginalisasi, programnya hanya sekedar mendukung pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan LSM. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan LSM antara lain

lewat wadah kuasi LSM tingkat nasional yang disebut Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), lewat SKB Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan LSM tahun 1993. Dan tak lama lagi upaya pengendalian LSM akan disempurnakan lewat Keppres.

Dengan demikian selama ini gerakan LSM seperti dinyatakan Mansour Fakih (1996) merupakan salah satu diantara pemain kunci terjadinya proses panjang marginalisasi, subordinasi, dominasi, hegemoni dan dehumanisasi terhadap kaum miskin.

Oleh karena itu (Medelina K. Hendytio, 1995:621), "LSM perlu mencari pola hubungan dengan pemerintah yang tetap menjamin otonomi dan efektivitas program kerjanya. Dalam hal ini Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) menyarankan pertama-tama harus ada kehendak dari dua belah pihak untuk berdialog yang melahirkan saling pengertian. Dari sini kemudian dapat dirancang dan dilaksanakan program kerja sama sambil mengurangi perbedaan dalam tujuan, metodologi dan cara-cara pencapaiannya. Kemudian pemerintah harus dapat mencair jalan untuk dapat memonitor LSM tanpa melanggar otonomi dan mengurangi efektivitas kerja LSM. Di lain pihak jika LSM berkeinginan untuk dilibatkan dalam perumusan kebijakan mereka harus menjalankan aktivitas dan programnya secara lebih simpatik, misalnya berkonsultasi dengan pemerintah serta transparan dalam pengelolaan sumber daya".

Sedangkan Legowo (1995:90) menyatakan "Pelibatan aktif masyarakat berarti pemberian peluang kepada masyarakat untuk berkembang menjadi civil society, yakni suatu masyarakat yang self-organizing, sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, ini hanya mungkin tercipta jika lembaga-lembaga politik itu fungsional. Sebab lembaga-lembaga politik yang disfungsi menutup peluang pelibatan aktif masyarakat, sehingga tidak mendorong perkembangan masyarakat menjadi suatu civil society. Fungsionalisasi lembaga-lembaga politik akan berlangsung secara normal kalau ditopang oleh suatu civil society. Dengan kata lain, pembentukan civil society perlu dibarengi oleh fungsionalisasi lembaga politik. Tanpa proses semacam ini, yang disebut pertama hanya kan menjadi suatu kumpulan masyarakat yang selalu "protes" terhadap lembaga-lembaga politik, sementara lembaga-lembaga politik berperan sebagai proforma demokrasi belaka".

Philip Eldridge, dalam artikelnya "NGO and State in Indonesia" (Arif Budiman, ed. 1990:530) menyatakan bahwa kontribusi NGOs di Indonesia terhadap demokratisasi tergantung beberapa syarat sebagai berikut :

While the NGOs movement has contributed greatly toward strengthening processes of democratisation in Indonesia, broadening of its popular base depends on achieving (1) effective synthesis between developmental and mobilization modes of actions; (2) integration between macro and micro level of actions; (3) reconciliation of differences, particularly between the second and third stream of NGOs, over basic political and social goals; (4) greater debureaucratisation of LPSM/LSM relationship, reconciling cooperative action with small group autonomy; (5) accelerated devolution of intermediary roles currently undertaken by LPSM/LSM to grassroots groups. NGOs' understanding of the role of the state vis-a-vis civil society will be central in determining how they will resolve these issues.

Dengan demikian, aktivitas LSM yang dapat mendorong demokratisasi dan lahirnya civil society, meskipun peluangnya ada, masih tergantung pada faktor internal dan eksternal.

Faktor internal misalnya, kemampuan LSM untuk memadukan antara pembangunan dan mobilisasi sosial, mengintegrasikan aktivitas makro dengan mikro, melakukan rekonsiliasi antara LSM itu sendiri tentang tujuan sosial dan politik, melakukan debirokratisasi dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil; mempercepat peranan mediasi terhadap kelompok bawah dalam rangka berhadapan dengan negara sehingga mempercepat terbentuknya civil society.

Sedangkan faktor eksternal, efektivitas LSM dalam mendorong demokrasi terutama akan dipengaruhi oleh berfungsi tidaknya lembaga-lembaga politik dan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan LSM sebagai mitra mewujudkan demokratisasi.

Dengan memperhatikan paradigma LSM dan berbagai pendapat tentang peluang LSM dalam ikut mengembangkan demokrasi, maka dapat dinyatakan perlu adanya perubahan paradigma aktivitas LSM dari developmentalisme ke transformasi sosial agar keterlibatan LSM dalam perubahan sosial lebih bermakna. Jika perubahan ini terjadi, maka sesungguhnya harapan LSM untuk ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat bisa lebih berkembang. Potensi itu ada mengingat ciri-ciri yang dimiliki LSM yaitu tidak mengejar keuntungan, birokrasi yang kecil, sentuhan kemanusiaan dan flexible, sangat efektif bagi upaya perubahan sosial. Disamping itu gerakan LSM lebih mengakar pada masyarakat dibanding dengan aktivitas parpol yang memang masih dibatasi oleh pemerintah untuk sampai ke bawah. Dan efektivitas gerakan LSM tentunya juga tergantung sejauh mana mampu bekerjasama dengan kekuatan politik potensial dan riil dalam masyarakat.

Penutup

Dinamika LSM selama ini, kurang mampu mendorong demokratisasi. Hal itu disebabkan masih banyak LSM yang kurang kritis dan kurang memiliki konsep dalam menangani proses marginalisasi mayoritas masyarakat sebagai salah satu dampak pembangunan.

Kemampuan LSM dalam ikut mendorong perkembangan demokrasi tergantung faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya : kemampuan memadukan aksi pembangunan dan mobilisasi, memadukan aktivitas makro dan mikro, kepekaan dan kecepatan melakukan mediasi dengan pemerintah, melakukan pekonsiliasi, meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok grass-root, debirokratisasi dalam organisasi. Dan faktor eksternal misalnya : berfungsi secara efektif tidaknya lembaga-lembaga politik yang ada, adanya saling pengertian dengan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Arif Budiman (ed.).1990.*State and Civil Society in Indonesia*. Australia : Monash University.
- Amir Effendi Siregar,Ed.1991.*Arus Pemikiran Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Cholisin.1996.Demokratisasi Lewat Pengembangan Civil Society. *Majalah Informatasi*, No.1 Th.XXIV,Februari. Yogyakarta : FPIPS IKIP YOGYAKARTA.
- Legowo.1995."Dinamika Demokrasi Di Indonesia".dalam Bantarto Bando-
no,dkk.,*Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta : CSIS.
- Mansour Fakhri.1996.*Masyarakat Sipil*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Medelina K. Hendytio.1995. "Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembuatan Kebijakan Publik". dalam Bantarto Bando, dkk., *Refleksi Setengah Abad KemerdekaanIndonesia*. Jakarta : CSIS.
- Ernest Gellner.1995. *Membangun Masyarakat Sipil*.Jakarta : Mizan.

Biodata:

Cholisin, lektor madya pada jurusan PPKn, aktif menulis di berbagai majalah seperti Cakrawala Pendidikan, Warta IKIP, Informasi dan lain-lain. Sekarang sedang mengambil S2 ilmu politik di UNAIR.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERDESAAN

Oleh : Hastuti

Abstrak

Perdesaan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dengan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahun berarti lahan usaha taninya menjadi semakin sempit. Apabila sektor pertanian tetap menjadi tumpuan sumber pendapatan tanpa pengelolaan lebih maju maka kemiskinan akan melanda penduduk di pedesaan. Oleh karena itu untuk mengelola sumber daya yang terbatas tersebut memerlukan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan keterbatasan sumber daya di pedesaan diperlukan pengembangan sumber daya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui berbagai upaya antara lain melalui pendidikan, peningkatan kesehatan dan peningkatan pendapatan. Melalui langkah pengembangan sumber daya manusia tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi pedesaan yang progresif, kondusif dan inovatif. Dengan kondisi pedesaan sedemikian tersebut diharapkan secara nyata membebaskan penduduknya dari belenggu kemiskinan.

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan asset berharga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas pembangunan Jangka Panjang antara lain melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu, disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu dan teknologi yang makin mantap (GBHN, 1993). Didalam pembangunan menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik manusia merupakan subyek sekaligus obyek. Manusia sebagai subyek merupakan sumber daya yang harus berperan secara aktif dengan kemampuan cipta, rasa dan karsanya dalam kancah pembangunan. Sedangkan manusia sebagai obyek merupakan kelompok penduduk yang harus ditingkatkan kesejahteraannya hidupnya.

Penduduk Indonesia saat ini berjumlah 200 juta (Bernas, 1997). Tersebar di wilayah seluas 741,1 ribu mil dan penduduk pedesaan mencapai 65 persennya (BPS, 1944). Sesuai dengan fakta yang ada berarti penduduk pedesaan merupakan sumber daya yang strategis dalam rangka pembangunan. Secara kuantitas penduduk pedesaan telah dapat diandalkan sebagai sumber daya pembangunan, namun demikian secara kualitas masih perlu peningkatan agar mampu berperan serta dalam pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia di pedesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi, peningkatan pembangunan sektoral dan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang mampu mendorong kemampuan penduduk di pedesaan guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya (GBHN, 1993).

Penduduk pedesaan yang sebagian besar hidupnya menggantungkan hidup